Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2025, 11 (10.D), 79-92
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11773
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Peran UN Women dalam Mengatasi Diskriminasi Gender dan Kekerasan Seksual di India tahun 2018-2023

Dinda Septiara[1] , Made Panji Teguh Santoso [2]

[1,2,] Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 05 September 2025
Revised: 17 September 2025
Accepted: 28 September 2025

Abstract

Gender discrimination and sexual violence against women remain serious issues in India, reflecting structural inequalities across various aspects of social, economic, and political life. UN Women, as a United Nations entity focused on gender equality and the empowerment of women, plays a vital role in driving policy changes and community empowerment. This study aims to analyze the role of UN Women in addressing gender discrimination and sexual violence against women in India through various policies and programs implemented during the 2018–2023 period. The research adopts a descriptive qualitative method using documentation studies and policy analysis approaches. The findings indicate that UN Women has been actively involved in policy advocacy, building partnerships with government institutions and civil society organizations, as well as implementing educational programs and public campaigns. Moreover, UN Women has contributed to strengthening the capacity of local institutions to handle cases of sexual violence and advocate for justice for victims. The strategic role of UN Women has proven effective in raising public awareness and improving legal frameworks to better protect women's rights in India.

Keywords: *UN Women, gender discrimination, sexual violence, Indian Women.*

(*) Corresponding Author: 2110631260020@student.unsika.ac.id

How to Cite: Septiara, D., & Santoso, M. (2025). Peran UN Women dalam Mengatasi Diskriminasi Gender dan Kekerasan Seksual di India tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(10.D), 79-92. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11773

PENDAHULUAN

Diskriminasi gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan dua permasalahan kompleks yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat India (Kurnia, 2023). Negara tersebut, meskipun mengalami kemajuan signifikan dalam bidang ekonomi dan teknologi, masih menghadapi tantangan besar dalam hal kesetaraan gender (Rohmawati,2023). Perempuan di India masih sering menjadi korban berbagai bentuk ketidakadilan, baik di ruang publik maupun domestik. Realitas ini diperparah oleh norma-norma budaya patriarkal yang masih dominan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual (Hendrastiti, 2021). Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi politik juga menjadi faktor penyumbang terhadap terjadinya diskriminasi sistematis yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Mustakimah, 2023). Fenomena kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan, pemaksaan pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta persekusi terhadap perempuan yang melaporkan kasus kekerasan, merupakan bentuk-bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi perempuan di India (Jameelah, 2018). Kasus pemerkosaan di India bahkan sempat menjadi sorotan dunia internasional, seperti

yang terjadi dalam kasus Nirbhaya tahun 2012, yang memicu gelombang protes besar-besaran dan mendorong adanya reformasi hukum (Pertiwi, 2021).

Namun, meskipun terdapat pembaruan hukum, tantangan implementasi kebijakan dan perlindungan korban masih sangat besar. Banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial, intimidasi dari pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Ketimpangan gender di India juga tercermin dalam data statistik. Banyak indikator menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerentanan yang lebih tinggi dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Rahmawati,2020).

Angka buta huruf perempuan lebih tinggi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lebih rendah, dan representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan maupun sektor publik juga sangat terbatas. Di tingkat akar rumput, perempuan sering kali tidak memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi, keputusan rumah tangga, bahkan hak atas tubuh mereka sendiri. Situasi ini menjadi ladang subur bagi kekerasan berbasis gender untuk terus berlangsung secara sistemik (Qomariah,2023).

Kekerasan Seksual di India, memiliki hambatan hukum dan hambatan lain untuk mendapatkan keadilan bagi korban, ini disebabkan karena bahwa penerapan undang-undang pemerkosaan masih buruk pada korban, khususnya mereka yang berasal dari komunitas yang terpinggirkan berdasarkan kasta, kelas, dan etnis, menghadapi banyak hambatan dalam mengakses keadilan (Datta, 2024).

Meskipun ada beberapa upaya untuk memajukan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan, penanganan masalah ini masih penuh dengan kesulitan (Equality Now, 2021). Pada akhirnya, banyaknya insiden kekerasan terhadap perempuan di India menunjukkan bahwa pemerintah belum banyak memikirkan semua kebijakan yang menangani masalah perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan diskriminasi (Panda, 2023).

Maka itu UN Women memiliki peran penting sebagai lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mandat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, termasuk di India (Sulaimah,2022). Lembaga ini lahir dari penggabungan beberapa badan PBB yang sebelumnya menangani isu perempuan, dengan tujuan memperkuat efektivitas intervensi dan koordinasi program global untuk perempuan. UN Women tidak hanya berperan sebagai penggerak agenda global, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun kapasitas negara anggota untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berbasis pada hak asasi manusia (Basiroen,2024).

Di India, UN Women telah aktif melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan aman bagi perempuan. Fokus kerja UN Women tidak hanya pada upaya pencegahan kekerasan, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan korban kekerasan. Intervensi dilakukan melalui berbagai program seperti edukasi publik, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan kapasitas organisasi perempuan, hingga dukungan terhadap reformasi kebijakan. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan prinsip partisipatif dan inklusif agar dapat menjangkau kelompok-kelompok rentan secara efektif.

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan UN Women dalam mengatasi diskriminasi gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan di India selama periode 2018-2023. Tahun-tahun ini dipilih karena mencakup periode dimana berbagai inisiatif penting diluncurkan, termasuk kampanye kesadaran, penguatan sistem hukum, dan program-program pemberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang ada dalam upaya mengatasi diskriminasi gender dan kekerasan seksual di India.

Kesenjangan penelitian dalam penelitian mengenai peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan di India (2018-2023) mencakup beberapa aspek (Pipin, 2023). Pertama, meskipun ada upaya yang signifikan dari UN Women, masih kurangnya data empiris tentang efektivitas program-program yang diterapkan, terutama dalam konteks lokal yang berbeda. Kedua, penelitian sebelumnya seringkali tidak mengeksplorasi tantangan spesifik yang dihadapi UN Women dalam implementasi kebijakan di India, seperti budaya patriarki yang mendalam. Terakhir, terdapat kebutuhan untuk analisis yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari intervensi UN Women terhadap perubahan sosial dan kebijakan di India

METODE

Penelitian mengenai Peran UN Women dalam Mengatasi Diskriminasi Gender dan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di India: Analisis Kebijakan Tahun 2018–2023 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana UN Women menjalankan perannya melalui kebijakan dan program nyata yang berkaitan dengan isu gender dan kekerasan seksual di India. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh, termasuk dinamika sosial, peran aktor, serta konteks kebijakan yang kompleks. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi dan analisis kebijakan. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi, laporan tahunan UN Women, publikasi kebijakan pemerintah India, artikel jurnal ilmiah, laporan dari lembaga non-pemerintah, serta berita media yang relevan pada periode 2018–2023. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber data utama untuk memahami aktivitas, strategi, serta capaian UN Women dalam menangani diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di India. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta perubahan kebijakan selama lima tahun terakhir.

Analisis kebijakan dilakukan untuk meninjau bagaimana kebijakan-kebijakan yang didorong atau didukung oleh UN Women dirumuskan, diimplementasikan, serta dampaknya terhadap upaya perlindungan perempuan. Analisis ini mencakup pemetaan aktor kebijakan, proses pengambilan keputusan, tujuan dan sasaran kebijakan, serta hasil dari kebijakan tersebut di lapangan. Dengan analisis ini, peneliti dapat menilai efektivitas intervensi UN Women serta sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menciptakan perubahan struktural dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu dengan

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pola-pola yang ditemukan dari data yang telah dianalisis.

Untuk menjaga validitas data, dilakukan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan sumber yang berbeda, termasuk laporan internasional, laporan lokal, serta data dari organisasi masyarakat sipil. Triangulasi ini penting untuk menghindari bias dan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Metode kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya menggambarkan peran UN Women secara deskriptif, tetapi juga menelaah bagaimana strategi mereka berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan sosial dalam konteks penanganan diskriminasi gender di India

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran strategis UN Women dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India

Diskriminasi gender terhadap perempuan di India merupakan permasalahan kompleks yang berakar pada sistem sosial, budaya, dan ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, tetapi juga dalam representasi politik dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. UN Women sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memegang peranan penting dalam upaya global maupun lokal, termasuk di India, untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan (Sulaimah,2022). Peran strategis UN Women terlihat dari pendekatan multilevel yang mereka gunakan untuk mengintervensi sistem yang mendukung terjadinya diskriminasi gender. UN Women tidak hanya fokus pada perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga menyasar komunitas akar rumput, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok perempuan yang rentan. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lokal. Salah satu strategi utama UN Women adalah melakukan advokasi kebijakan yang mendorong perubahan sistemik dan jangka panjang. Advokasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian, parlemen, serta lembaga legislatif dan eksekutif lainnya di India untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi ke dalam perumusan kebijakan publik.

UN Women juga mendorong penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam hal perlindungan hukum terhadap diskriminasi di tempat kerja, akses ke pendidikan yang setara, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan di ruang publik. Salah satu contoh keberhasilan dari pendekatan ini adalah keterlibatan UN Women dalam mendukung pelaksanaan Gender Budgeting di India, yang bertujuan memastikan bahwa anggaran negara memperhitungkan kebutuhan perempuan secara adil dan proporsional. Pendekatan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menerima

manfaat dari kebijakan fiskal secara lebih setara. Kolaborasi antara UN Women dan pemerintah India juga mencerminkan peran strategis dalam membentuk opini publik dan mendorong kesadaran kolektif terhadap isu gender. UN Women meluncurkan berbagai kampanye nasional yang bertujuan mengubah norma dan stereotip sosial yang menjadi akar diskriminasi terhadap perempuan. Kampanye seperti HeForShe, Safe Cities, dan Orange the World berhasil menarik perhatian publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan kesetaraan gender. Kegiatan kampanye ini juga sering kali menggandeng tokoh masyarakat, media, dan influencer yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.

UN Women memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan yang mengalami marginalisasi ganda, seperti perempuan dari kasta rendah, perempuan penyandang disabilitas, serta perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Dalam konteks ini, UN Women berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan kelompok rentan dengan kebijakan yang tengah dirancang oleh pemerintah. Pemberdayaan perempuan di tingkat lokal menjadi strategi penting dalam menciptakan perubahan sosial dari bawah ke atas. UN Women mendukung pelatihan kepemimpinan perempuan, penguatan organisasi perempuan lokal, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu aspek penting dari peran UN Women karena ketimpangan gender dalam penguasaan sumber daya ekonomi sering kali menjadi akar dari ketergantungan perempuan terhadap laki-laki, yang kemudian memperparah kerentanan terhadap diskriminasi. Melalui program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pendampingan usaha kecil, UN Women mendorong perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Ketika perempuan memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat di dalam keluarga maupun masyarakat.

Peran UN Women dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu strategi penting dalam mengatasi diskriminasi gender. Sistem ini memungkinkan pengukuran dampak kebijakan secara objektif terhadap perempuan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Pendekatan berbasis data ini memperkuat posisi UN Women sebagai mitra teknis yang kredibel dan profesional di mata para pembuat kebijakan. Kolaborasi internasional dan pertukaran praktik baik dari negara-negara lain menjadi elemen penting dari strategi UN Women. India sebagai negara berkembang mendapatkan banyak manfaat dari jejaring global UN Women, baik dalam bentuk pendanaan, teknologi, maupun sumber daya manusia. Melalui kerja sama ini, UN Women membantu India untuk mengadaptasi kebijakan global yang terbukti berhasil dalam mengatasi diskriminasi gender di berbagai belahan dunia. Akses terhadap praktik baik ini mempercepat proses perubahan dan meminimalkan risiko kegagalan kebijakan.

Peran strategis UN Women juga terlihat dalam upayanya memperkuat kapasitas lembaga dan aktor lokal, termasuk lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan. Pelatihan, seminar, dan modul pendidikan tentang kesetaraan gender diberikan secara intensif untuk memastikan bahwa perspektif gender diinternalisasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Proses ini menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif, UN

Women telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan perubahan struktur, nilai sosial, dan kebijakan publik secara simultan. UN Women membuktikan bahwa intervensi berbasis kemitraan, data, dan penguatan komunitas merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan setara bagi perempuan.

Kontribusi UN Women Dalam Mengatasi Diskriminasi Gender dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di India

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTPAP) masih menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak terjadi di seluruh dunia (UN Women 2020). Hampir satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan intim atau kekerasan seksual bukan pasangan setidaknya satu kali dalam hidup mereka (UN Women 2020). Pada tahun 2023, sekitar 51.100 perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga, dengan rata-rata 140 kematian per hari (UN Women, 2025). Mengatasi krisis ini membutuhkan strategi yang komprehensif, dan UN Women memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya global untuk mencegah dan menanggapi KTPAP (UN Women, 2025). Kontribusi utama UN Women dalam mengatasi diskriminasi gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk advokasi kebijakan, dukungan teknis kepada pemerintah, penguatan kapasitas masyarakat sipil, serta penyediaan data dan penelitian (Salma & Hapsari, 2023).

Salah satu kontribusi signifikan UN Women adalah mendorong perumusan dan penerapan kebijakan serta undang-undang nasional yang berpihak pada perempuan, seperti Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual di berbagai negara (Hay, 2022). Selain itu, UN Women menginisiasi kampanye global seperti HeForShe dan Orange the World, yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap Perempuan (Hay, 2022). Organisasi ini juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga layanan sosial untuk memastikan akses keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual (Hay, 2022).

Dalam situasi darurat dan konflik, UN Women aktif menyediakan layanan pemulihan psikososial, bantuan hukum, serta program pemberdayaan ekonomi untuk korban (Hay, 2022). Di tingkat global, UN Women turut menyusun dan mengawasi implementasi konvensi dan perjanjian internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta mendukung target-target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender (UN Women, 2020). Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, UN Women berperan penting dalam membangun dunia yang lebih aman dan setara bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia (UN Women, 2020).

Upaya Pemerintah India Dalam Menganggulangi Kekerasan Seksual Dan Diskriminasi Gender

Kekerasan seksual dan Diskriminasi Gender masih menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan meluas di India (Suprobowati & Zuhad, 2024) Dari kasus-kasus pemerkosaan beramai-ramai yang

menggemparkan negara ini hingga ribuan insiden yang tidak dilaporkan yang terjadi setiap hari, skala dan dampak dari kekerasan seksual tidak dapat dibesar-besarkan. Selama dua dekade terakhir, pemerintah India telah memperkenalkan serangkaian langkah-langkah hukum, kelembagaan, dan kebijakan untuk mengatasi masalah ini (Suprobowati & Zuhad, 2024), Pemerintah India telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kekerasan seksual dan diskriminasi gender, meskipun tantangan struktural dan budaya masih signifikan (Chandra & Patel, 2023). Salah satu tonggak penting adalah pengesahan Criminal Law (Amendment) Act, 2013 atau dikenal sebagai Undang-Undang Nirbhaya, yang diberlakukan setelah kasus pemerkosaan brutal di Delhi pada tahun 2012 (Chandra & Patel, 2023).

Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual, memperberat hukuman bagi pelaku, dan memperkenalkan kejahatan baru seperti penguntitan dan voyeurism (Chandra & Patel, 2023). Untuk mendukung implementasi hukum tersebut, pemerintah membentuk Nirbhaya Fund dengan alokasi awal sebesar 21.000 crore pada tahun 2013 (Sabri & Rameshkumar, 2022). Dana ini digunakan untuk mendirikan One Stop Centres (pusat layanan terpadu) bagi korban kekerasan, serta mendanai proyek-proyek keamanan perempuan di ruang publik, seperti inisiatif Safe City di berbagai kota besar (Sabri & Rameshkumar, 2022). Diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sexual Harassment Electronic Box (SHe-Box) merupakan inisiatif Pemerintah India untuk menyediakan platform satu jendela bagi perempuan untuk melaporkan pengaduan pelecehan seksual di tempat kerja. Platform ini dapat diakses oleh semua perempuan, apa pun sektor pekerjaannya (terorganisasi/tidak terorganisir, publik/swasta). Setelah pengaduan diajukan di SHe-Box, pengaduan tersebut secara otomatis diteruskan ke otoritas terkait untuk ditindaklanjuti. Platform ini memastikan penyelesaian dan akuntabilitas yang cepat atas kasus pelecehan di tempat kerja (PIB Delhi, 2025).

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, emosional, dan ekonomi (Jameel & Ahmed, 2021). Di tingkat internasional, India telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1993 dan aktif dalam berbagai inisiatif PBB terkait kesetaraan gender (UN Women, 2023). Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan (Jameel & Ahmed, 2021).

Tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual tetap rendah karena stigma sosial, dan sistem peradilan. yang lambat serta kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum memperburuk situasi (Jameel & Ahmed, 2021). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tercatat 31.516 kasus pemerkosaan, meningkat 20% dari tahun sebelumnya, namun tingkat penghukuman hanya sekitar 27% (National Crime Records Burea, 2023). Upaya masyarakat sipil juga memainkan peran penting. Misalnya, Swati Maliwal, mantan Ketua Komisi Perempuan Delhi, berhasil meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai inisiatif seperti inspeksi mendadak dan kampanye kesadaran publik (Bhowmick, 2025). Meskipun demikian, insiden kekerasan terhadap perempuan,

seperti kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter muda di Kolkata pada tahun 2024, menunjukkan bahwa tantangan masih besar dan memerlukan reformasi sistemik yang lebih mendalam (Bhowmick. 2025).

Untuk mendorong pelaporan kasus kekerasan, pemerintah juga memperkenalkan layanan pengaduan yang lebih mudah diakses seperti Women Helpline 181, serta mendirikan One Stop Centres di berbagai distrik yang memberikan layanan terpadu dari konseling psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan fisik bagi korban kekerasan (UN Women, 2023). Selain itu, melalui Undang-Undang Protection of Women from Domestic Violence Act (2005), perempuan kini memiliki perlindungan hukum terhadap kekerasan di rumah tangga, yang mencakup tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis, ekonomi, dan seksual. Dalam ranah ketenagakerjaan, pemerintah India telah memperkenalkan kebijakan inklusif, termasuk implementasi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (2013), yang mewajibkan semua institusi publik maupun swasta membentuk komite internal untuk menangani laporan pelecehan. Selain itu, upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal juga terus digalakkan melalui pelatihan keterampilan dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan (UN Women, 2023). Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Banyak korban kekerasan seksual yang masih enggan melapor karena stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum, dan ketidaksetaraan struktural yang masih mengakar. Oleh karena itu, selain reformasi hukum, diperlukan perubahan budaya dan edukasi jangka panjang untuk benar-benar menghapus diskriminasi gender di India.

Evaluasi Kebijakan dan Program UN Women di India Mengatasi Diskriminasi Gender Dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di India Tahun 2018-2023

UN Women, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, telah memainkan peran penting di India dalam mengatasi isu diskriminasi gender dan kekerasan seksual terhadap Perempuan(UN Women, 2024). Selama tahun 2018–2023, UN Women menerapkan berbagai program strategis yang difokuskan pada reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga, serta pemberdayaan komunitas akar rumput untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak Perempuan (UN Women, 2023).

Salah satu program utama UN Women di India adalah "Safe Cities and Safe Public Spaces", yang bekerja sama dengan pemerintah kota dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ruang publik yang bebas dari kekerasan berbasis gender (UN Women India. (2025). Di kota-kota seperti Delhi dan Hyderabad, program ini berhasil mendorong implementasi teknologi pemantauan seperti CCTV, pelatihan untuk petugas penegak hukum, dan peningkatan pencahayaan di ruang-ruang publik yang rawan (UN Women India. 2025). Program ini dievaluasi secara berkala dan menunjukkan penurunan insiden pelecehan seksual di ruang publik serta peningkatan kepercayaan perempuan terhadap keamanan kota mereka (UN Women India, 2022).

UN Women bekerja sama dengan berbagai LSM dan komunitas lokal untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Lembaga-lembaga ini memiliki pengetahuan lokal dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga mampu

menjembatani program global dengan realitas sosial di tingkat bawah. Kolaborasi ini mencakup penyediaan layanan konseling bagi korban kekerasan seksual, penyuluhan tentang hak-hak perempuan, serta pembentukan kelompok dukungan sebaya yang memperkuat solidaritas sosial. Beberapa organisasi masyarakat sipil yang menjadi mitra UN Women antara lain Jagori, Breakthrough, dan SEWA (Self Employed Women's Association).

Organisasi-organisasi ini memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui kemitraan ini, UN Women mendukung penyelenggaraan lokakarya, pelatihan keterampilan, program literasi keuangan, dan inisiatif wirausaha sosial. Tujuannya bukan hanya mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan diri perempuan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam masyarakat.

Kemitraan juga terbentuk dalam bidang pendidikan dan media. UN Women menggandeng universitas, lembaga pendidikan, serta pelaku media massa untuk menyebarkan narasi yang mendukung kesetaraan gender dan menolak kekerasan berbasis gender. Kampanye publik seperti "HeForShe" dan "Orange the World" mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, selebritas, dan pemuda, sehingga pesan kampanye dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi komunikasi ini berkontribusi dalam membentuk opini publik yang lebih progresif terhadap isu perempuan. Kerja sama lintas aktor ini tidak hanya memperkuat jaringan advokasi, tetapi juga mempercepat proses perubahan sosial. UN Women bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan publik, serta mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Keberhasilan kerja sama ini bergantung pada dialog yang terbuka, pembagian peran yang jelas, dan keberlanjutan program yang didasarkan pada evaluasi dan pembelajaran bersama. Pemberdayaan perempuan di India membutuhkan pendekatan multipihak yang menyentuh aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu. UN Women melalui kemitraannya telah menunjukkan bahwa perubahan dapat dicapai ketika semua pihak terlibat secara aktif dan konsisten. Bentuk kerja sama ini juga menjadi contoh praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Keberhasilan inisiatif ini mencerminkan pentingnya solidaritas global dan lokal dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi perempuan.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap program dan kebijakan UN Women di India selama 2018–2023 menunjukkan kemajuan penting dalam meningkatkan kesadaran, memperkuat kebijakan, dan menciptakan ruang publik yang lebih aman bagi perempuan. Namun, keberlanjutan program, penguatan kapasitas lokal, serta perubahan norma sosial jangka panjang tetap menjadi kunci untuk mencapai transformasi menyeluruh dalam pemberantasan diskriminasi gender dan kekerasan seksual di India (UN Women India, 2025).

Bentuk kerja sama UN Women dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam pemberdayaan perempuan di India.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan. Pemerintah India, dengan dukungan teknis dan advokasi dari UN Women, telah melakukan reformasi legislatif dan memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, dan kejahatan berbasis

gender lainnya. UN Women juga mendukung pemerintah dalam implementasi dan pemantauan undang-undang ini untuk memastikan efektivitasnya di tingkat akar rumput.

Selain itu, kemitraan ini berfokus pada peningkatan akses perempuan terhadap layanan dukungan yang esensial. Ini termasuk pendirian dan penguatan pusat-pusat krisis satu atap (One Stop Centres) yang menyediakan bantuan medis, hukum, psikologis, dan tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan. UN Women bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas para penyedia layanan dan memastikan bahwa respons terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dilakukan dengan sensitif dan efektif. Peningkatan kesadaran dan perubahan norma sosial juga menjadi komponen penting dalam kerja sama ini. Berbagai kampanye publik dan program pendidikan dilakukan untuk menantang stereotip gender yang berbahaya, mempromosikan kesetaraan, dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan serta konsekuensi dari diskriminasi dan kekerasan. UN Women mendukung pemerintah dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum muda, tokoh agama, dan pemimpin komunitas, untuk mendorong perubahan perilaku dan sikap yang lebih positif terhadap perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi bagian integral dari upaya bersama ini. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perempuan, memberikan akses ke peluang kerja dan kewirausahaan, serta memperkuat kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi didukung melalui kemitraan ini. Pemberdayaan ekonomi diyakini dapat meningkatkan otonomi perempuan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Bentuk kerja sama UN Women dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di India menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. UN Women menjalankan perannya tidak secara tunggal, melainkan membangun kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan perubahan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup pembentukan kebijakan, pelaksanaan program di tingkat komunitas, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Pemerintah India menjadi mitra strategis utama UN Women dalam perumusan dan implementasi berbagai kebijakan terkait kesetaraan gender. Kementerian Urusan Perempuan dan Anak (Ministry of Women and Child Development) menjadi salah satu institusi yang banyak terlibat dalam kerja sama teknis dan penyusunan program. UN Women mendukung pemerintah dalam pengembangan kebijakan nasional seperti "Beti Bachao Beti Padhao" (Selamatkan Anak Perempuan, Didik Anak Perempuan) yang bertujuan mengubah persepsi masyarakat terhadap anak perempuan serta meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan perlindungan sosial.

Kerja sama juga terlihat dalam pengembangan sistem hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada perempuan. UN Women mendampingi pemerintah dalam proses advokasi dan revisi kebijakan terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, akses keadilan, dan reformasi sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kehidupan perempuan, terutama mereka

yang berasal dari kelompok rentan seperti perempuan miskin, perempuan desa, dan perempuan dari kasta rendah. Di tingkat lokal, UN Women bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelatihan, kampanye kesadaran publik, serta program pemberdayaan ekonomi perempuan. Pendekatan ini memperkuat akar rumput dan mendorong partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan dilibatkan sebagai agen perubahan dalam komunitas mereka sendiri, sehingga tercipta ruang bagi peningkatan kapasitas individu sekaligus penguatan kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UN Women memainkan peran strategis dalam mengatasi diskriminasi gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan di India pada periode 2018–2023. Peran tersebut diwujudkan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup advokasi kebijakan, pemberdayaan perempuan, dan pembentukan kesadaran publik. UN Women secara aktif terlibat dalam mendukung reformasi hukum dan kebijakan pemerintah India yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender, serta mempromosikan kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan. Dalam aspek advokasi dan kebijakan, UN Women mendorong penguatan kapasitas lembaga negara dalam menangani kasus kekerasan seksual serta meningkatkan respons hukum terhadap kebutuhan korban.

Organisasi ini juga terlibat dalam penyusunan dan implementasi program nasional seperti One Stop Centres, yang memberikan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, UN Women menjalankan berbagai kampanye kesadaran publik, seperti HeForShe dan Orange the World, yang berkontribusi dalam mengubah persepsi sosial dan budaya yang selama ini mendukung ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. UN Women juga berperan sebagai fasilitator dan mediator antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Organisasi ini memberikan dukungan teknis dan finansial kepada pemerintah India untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang ramah gender, serta memfasilitasi dialog dan kerja sama lintas sektor guna memperkuat posisi perempuan dalam sistem pemerintahan

Dalam hal pemberdayaan ekonomi dan sosial, UN Women memberikan pelatihan keterampilan, mendukung kewirausahaan perempuan, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi perempuan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka dalam masyarakat dan keluarga, yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam mencegah kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, tantangan struktural dan kultural yang kompleks masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Sistem patriarki yang mengakar kuat, rendahnya tingkat literasi gender di masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas intervensi. Oleh karena itu, keberhasilan upaya UN Women sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara aktor nasional, lokal, dan internasional dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan di India.

Selain itu, pemerintah India meskipun telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), implementasinya masih sangat terbatas. Banyak kebijakan yang hanya bersifat preventif dan belum menyentuh akar permasalahan, seperti perlindungan hukum yang tidak efektif dan birokrasi yang lamban dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Keterbatasan jumlah petugas perlindungan perempuan dan minimalnya sumber daya juga memperlambat penanganan kasus kekerasan. UN Women mengukur keberhasilan program mereka di India dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan dampak langsung terhadap pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, UN Women berperan sebagai aktor global yang tidak hanya memberikan bantuan teknis dan pendanaan, tetapi juga mendorong perubahan struktural dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menghapus kekerasan terhadap perempuan di India. Peran ini diharapkan dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan.

REFERENCES

Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Jakarta: SMERU Research Instituate.

Awaru, A. O. T., & Ahmad, M. R. S. (2023). Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 9(2).

Basiroen, V. J., Mahmudah, H., Hidayat, A. A., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Ilma, A. F. N. (2024). Women Empowerment: Women's Journey to Empowerment. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Bhowmick, N. (2025, 1 2025). *The women dividend in India.* Retrieved from newint.org: ttps://newint.org/work/2025/women-dividend-india

Hay, B. (2022). #HeForShe: Menyatukan Komunitas Global Melalui Media Sosial. *The Macksey Journal* , *3* (1).

Hendrastiti, T. K. (2021). Tersembunyi di antara harapan tumbuh: demokrasi di bumi raflesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jameelah, M. (2018). Dinamika psikologi pada dekolonisasi pengetahuan perihal pengalaman kekerasan terhadap perempuan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Kurnia, N., Rizki, K., & Zulkarnain, Z. (2023). Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India Terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India. Indonesian Journal of Global Discourse, 5(1), 73-89.

Mustakimah, L., Huriani, Y., & Zulaeha, E. (2023). Tantangan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kesetaraan gender pada masyarakat desa. Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies, 4(1), 12-29.

Pertiwi, W. S., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. Indonesian Journal of Global Discourse, 3(1), 55-80.

Qomariah, S. (2023). Program komunitas solidaritas perempuan Kota Mataram dalam pemberdayaan perempuan petani (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. U. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. EcceS: Economics Social and Development Studies, 7(1), 110-129.

Rohmawati, P. I., Alchatib, S. R., & Harini, S. (2023). Peran UN Women terhadap Gender-Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018. Jurnal Alternatif-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 14(2).

Salma, N. A., & Hapsari, R. D. (2023). Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun 2020-2022. Jurnal Hubungan Internasional, 16(2).

Sulaimah, S. (2022). Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan Tahun 2018-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Suprobowati, G. D., & Zuhad, F. (2024, December). Sexual Violence Againts Women in India. In *International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2024)* (pp. 208-218). Atlantis Press.

Widyaputri, P. D. (2024). Kebijakan BBBP Sebagai Pembangunan Holistik Pemerintahan Narendra Modi dalam Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan di India Tahun 2015-2017 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

UN Women. (2019, September 25). *Gender-based violence against women and girls*.Retrieved from United Nations:https://www.ohchr.org/en/women/gender-

UN Women . (2021, Januari 12). *UN-Women Executive Board Members*. Retrieved from unwomen.org: https://www.unwomen.org/en/executive-board/members basedviolence-against-women-and-girls

UN Women. (2022, JUNE 22). *A comprehensive approach to ending violence against women in rural spaces in India.* Retrieved from unwomen.org: https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/06/a-comprehensive-approach-to-ending-violence-against-women-in-rural-spaces-in-india

UN Women India. (2022). Safe Cities and Safe Public Spaces Programme Annual Report. https://india.unwomen.org

UN Women. (2021). Annual Report 2020-2021: Advancing Gender Equality. https://www.unwomen.org

UN Women. (Friday, 24 November 2023, November 24). *Facts and figures: Ending violence against women.* Retrieved from eca.unwomen.org: https://eca.unwomen.org/en/stories/explainer/2023/12/facts-and-figures- ending-violence-against-women

UN Women. (2024, November 11). *Result at a Glanc.* Retrieved from asiapacific.unwomen.org: https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/result-at-a-glance

UN Women India. (2025, January 11). *Advancing gender equality and empowering women across India.* Retrieved from asiapacific.unwomen.org: https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india